

**KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS**



**THESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**ROQI YASIN  
1717611008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

# **KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Roqi Yasin**  
NIM. 1717611008

## **ABSTRAK**

Latar belakang peneliti tertarik melakukan penelitian ini, yaitu; *Pertama*, Program PKH merupakan salah satu kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, upaya meningkatkan standar hidup masyarakat miskin, dan perubahan perilaku masyarakat miskin. *Kedua*, Kemiskinan di Banyumas dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan. Didasarkan pada hal tersebut, maka pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas yang diturunkan ke dalam 3 pertanyaan mendasar yakni, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis Kebijakan PKH dalam Pengentasan Kemiskinan.

Teori ini didasarkan pada Teori Karl Popper. dan Kementrian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, dimana dapat dirumuskan beberapa poin yang merupakan poin mendasar dalam Kebijakan meliputi konsep, prinsip dan implementasi Kebijakan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi multikasus. Subjek utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Kejahteraan Sosial, Penanganan fakir Miskin, (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas dan Pelaksana Program PKH Kabupaten Banyumas meliputi Kordinator Pendamping PKH Kabupaten, Pendamping PKH Kecamatan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PKH di kabupaten Banyumas dari Pendataan Calon KPM PKH sampai mendapat Bantuan PKH dan perjalanan menjadi KPM dan sampai Graduasi di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020 dan PKH juga memberikan dampak positif pada kondisi masyarakat sekarang yaitu mewujudkan kemajuan dalam masyarakat terutama kemajuan kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat dengan adanya 3971 KPM Graduasi mandiri. Selama periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pemerintah dapat menggandeng Lembaga zakat yang ada untuk mengentaskan kemiskinan

**Kata Kunci : Kebijakan, Program, Keluarga, Harapan, Dinsospermades, Banyumas, Pendamping, Pengentasan, Kemiskinan, Miskin, Kesejahteraan, Falah, Zakat, Graduasi.**

# **POLICY OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) IN POVERTY REDUCTION IN BANYUMAS DISTRICT**

**Roqi Yasin**  
NIM. 1717611008

## **ABSTRACT**

### **ABSTRACT**

The background of researchers interested in doing this research, namely; First, the PKH Program is one of the policies for poverty alleviation, efforts to improve the living standards of the poor, and change the behavior of the poor. Second, poverty in Banyumas in the last three years has decreased significantly. Based on this, the big question in this research is how the Program keluarga Harapan (PKH) Policy in Poverty Alleviation in Banyumas is derived into 3 basic questions namely,, Implementation of the Program keluarga Harapan (PKH) in alleviating poverty, Contribution of the Program keluarga Harapan (PKH) PKH) in alleviating poverty, Conditions of poverty in Banyumas Distrik and Islamic and Conventional Views on PKH Policies. The purpose of this study is to explore and analyze the PKH Policy in Poverty Alleviation.

This theory is based on Karl Popper's Theory. and the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, General Guidelines for the Program keluarga Harapan, where several points can be formulated which are fundamental points in the Policy covering the concept, principle and implementation of the Policy.

This type of research is qualitative with a multi-case study approach. The main subjects of this study were the Head of the Social Welfare, Handling of the Poor, (Dinsospermades) Banyumas Regency and the Banyumas Regency PKH Program Implementers including the District PKH Facilitator Coordinator, District PKH Facilitator. While the data collection techniques, namely through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of PKH in Banyumas district from the PKH KPM Candidate Data Collection to receiving PKH Assistance and the journey to KPM and until Graduation in Banyumas Regency in accordance with the 2020 PKH Guidelines and PKH also has a positive impact on the current condition of society, namely realizing progress in society especially the progress of health, education and the community's economy with the existence of 3971 independent Graduation KPM. During the 2017-2019 period, the number and percentage of poor people in Banyumas showed a downward trend. However, in 2020, the number of poor people in Banyumas has increased. This may be due to the COVID-19 pandemic. The government can cooperate with existing zakat institutions to alleviate poverty

. **Keywords: Policy, Program, Family, Hope, Dinsospermades, Banyumas, Companion, Alleviation, Poverty, Poor, Welfare, Falah, Zakat, Graduation.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Tesis .....	ii
Lembar Pengesahan Munaqosyah.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstraksi Penelitian .....	v
Abstraksi Penelitian English .....	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....	vii
Kata Pengantar .....	xii
Motto Penulis .....	xiv
Persembahan .....	xv
Daftar Isi.....	xvi
Daftar Gambar Dam Tabel.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPA (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN</b>	
A. Teori Kebijakan Program .....	19
1. Pengertian Teori Kebijakan .....	19
2. Tujuan Kebijakan .....	21
3. Fungsi Kebijakan .....	23
B. Manajemen Kebijakan Program Keluarga Harapan.....	25
1. Pengertian PKH.....	26
2. Tujuan PKH.....	28

3. Konsep PKH.....	29
4. Prosedur PKH.....	30
5. Langkah Langkah Pelaksanaan PKH .....	32
C. Jaminan Sosial Program PKH .....	34
D. Pengentasan Kemiskinan.....	37
E. Hasil Penelitian yang Relevan.....	45
F. Kerangka Berpikir .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
C. Data dan Sumber Penelitian .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
1. Observasi .....	56
2. Wawancara .....	57
3. Dokumentasi.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINA</b>	
A. Hasil Penelitian .....	63
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas .....	64
2. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat .....	72
3. DINSOSPERMENDES Kabupaten Banyumas.....	76
B. Pembahasan .....	79
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	79
1) Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Nasional .....	79
2) Kebijakan Pemda Banyumas Mengentaskan Kemiskinan.....	85
3) Implementasi Program Keluarga Harapan PKH.....	94
1) Penetapan Calon Peserta PKH .....	94

2) Penyiapan Data Awal Validasi .....	95
3) Pertemuan Awal dan Validasi.....	97
4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH .....	100
5) Penyaluran Bantuan .....	101
6) Pendampingan .....	109
7) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).....	111
8) Verifikasi Komitmen .....	113
9) Pemutakhiran Data;.....	114
10) Pengaduan .....	115
4) Faktor Pendukung dan Penghambat .....	118
5) Solusi Kendala dalam Implementasi PKH .....	120
2. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas.....	121
1) Kontribusi PKH dalam dalam Bidang Kesehatan.....	128
2) Kontribusi PKH dalam Bidang Kesehatan.....	130
3. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH .....	132
1) Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas .....	132
2) Pandangan Islam Dan Konvensional Tentang PKH .....	138
a) Pandangan Secara Konvensional Tentang Kebijakan PKH...138	
b) Pandangan Secara Islam Tentang Kebijakan PKH.....	139
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	142
B. Saran .....	143
C. Rekomendasi .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN INSTRUMEN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita luhur dari setiap bangsa adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi yang lebih penting adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang bebas dari kemiskinan. Dalam Pembukaan UUD 1945, UUD mengamanatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan melindungi darah seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan kemandirian., tatanan dunia tan[pa penjajahan. Perdamaian dan keadilan sosial.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kemiskinan dan pengangguran ibarat fenomena gunung es, masih ada hal belum bisa dijelaskan karena masih banyak yang tidak diketahui. Fenomena ini sebenarnya tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling terkait dan berhubungan. Pengamat sosial, politik, ekonomi dan budaya telah menyuarakan keprihatinan, dan mereka menyadari bahwa apabila tidak ada contoh dan kerja keras yang serius dari Para pemangku kebijakan, maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus diteliti dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab keterbelakangan dan menghambat pembangunan nasional. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*Multiplier Effects*)

---

<sup>1</sup>Wisnu Indrajid V. O. Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm.25.

terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.<sup>2</sup>

Masalah kemiskinan juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, yang tidak produktif di pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.<sup>3</sup>

Kemiskinan adalah kondisi multidimensi, dan sulit untuk didefinisikan dengan satu definisi. Banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba untuk mendefinisikan konsep kemiskinan, tetapi belum ada yang mencapai konsensus tentang konsep kemiskinan dalam definisi yang diterima. Perspektif yang digunakanpun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.<sup>4</sup> Konsep kemiskinan secara universal mendefinisikan bahwa kemiskinan ialah keadaan seorang ataupun sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk penuhi kebutuhan hidup yang aman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, ataupun ukuran spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seorang dalam penuhi kebutuhan hidupnya.

Islam memandang kemiskinan bukan cuma semata-mata ketidakmampuan dalam penuhi kebutuhan dasar namun kemiskinan ialah salah satu permasalahan kultural dimana seorang menjadi miskin sebab perilaku buruknya semacam malas buat bekerja serta berusaha.<sup>5</sup>

Kemiskinan kultural ini membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga dan serta warga. Islampun menjawab kemiskinan sebagai bencana

---

<sup>2</sup>Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.280.

<sup>3</sup>Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat..*, hlm. 285.

<sup>4</sup>Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembnaganan, Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm.299.

<sup>5</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm.70.



serta musibah yang wajib meminta perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Bila kemiskinan itu terus menjadi-jadi, sehingga ini akan menjadi kemiskinan yang mampu menciptakannya sifat lupa kepada Allah serta pula rasa sosialnya terhadap sesama.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus, maka harus ada kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. dalam formulasi Kebijakan wajib memakai riset serta data terbaik yang ada mengenai hasil program untuk membuat keputusan di seluruh tahapan proses kebijakan serta di tiap cabang pemerintahan. Perkembangan kebijakan yang berlangsung pada berbagai tahap serta meluas dari waktu ke waktu untuk merespon serta menanggulangi permasalahan yang ada. Menurut Sanderson bahwa penekanan lebih harus diberikan pada pengembangan basis bukti yang kuat untuk kebijakan melalui evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan dan program.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT), program yang cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi Negara-negara lain yang telah melaksanakan program tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya diperkenalkan untuk membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan daya beli ketika pemerintah menyesuaikan harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, serta memutus rantai kemiskinan yang telah terjadi selama ini. . Program Keluarga Harapan merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam strategi cluster pertama untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Program ini bersifat bantuan bersyarat dan disesuaikan dengan

---

<sup>6</sup> Viqra Ramadanti, *Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)*, (Thesis tidak diterbitkan Universitas Negeri Makassar), hlm.112.

komponen, kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. Kesembungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan melenium (*Millennium Developmen Goals* atau MDGs).<sup>7</sup>

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dimensi kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga masalah non-ekonomi.. Kemiskinan tidak hanya berurusan dengan tingkat kesejahteraan sosial, sehingga ukuran kemiskinan sangatlah relatif, yakni individu yang satu akan berbeda dengan individu yang lain.<sup>8</sup> Untuk mendeteksi kemiskinan, ada beberapa strategi, diantaranya adalah strategi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar (*basic needs*) dipakai sebagai alat ukur kemiskinan direkomendasikan *United Nations* (1961), UNSRID (1966), Untuk konteks Indonesia, kebutuhan dasar menurut Biro Pusat Statistik terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).<sup>9</sup> Selain itu kemiskinan juga dapat dilihat dari (1) Terbatasnya akses pendidikan berkualitas, (2) Terbatas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas (3) Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (4) Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan, (5) Terbatasnya akses informasi, (6) Terbatasnya akses transportasi, dan (7) Terbatasnya akses social.<sup>10</sup>

Untuk memahami permasalahan kemiskinan di Indonesia, perhatian juga harus diberikan pada letak tiap daerah yaitu tingkat kemiskinan lokal yang diidentifikasi oleh masyarakat atau pemerintah daerah. Mengembangkan struktur ekonomi yang ideal merupakan mekanisme perencanaan untuk menetapkan strategi sehingga semua keputusan yang

---

<sup>7</sup>Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta), hlm.9.

<sup>8</sup> Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2015), hlm.7

<sup>9</sup> Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian ....*, hlm.15

<sup>10</sup> Istiana Hermawati, Dkk, *Pengkajian ....*, hlm.19

diambil dapat diambil secara tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam pengambilan keputusan ini, data statistik memiliki perencanaan yang sangat penting untuk perencanaan strategi pengembangan dan hasil yang diperoleh untuk menentukan pedoman masa depan. Ini harus menghasilkan pertumbuhan dan mengubah struktur ekonomi yang ada, seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi regional bekerja sama antara sektor swasta dan pemerintah masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan. dialami di seluruh dunia Masalah kemiskinan itu sendiri tidak hanya menimpa dunia ketiga dan negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah.<sup>11</sup>

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang harus dipenuhi adalah pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara berhak untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk itu, pemerintah merencanakan berbagai langkah agar masyarakat miskin dapat terus mengakses Pendidikan dan kesehatan. Dan tindakan ini dilakukan pemerintah juga untuk melindungi masyarakat miskin yang notabene sama sekali tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya.<sup>12</sup> hal ini seperti konsep dari islam yaitu *damān al-Ijtimā*. Menurut Muhammad Syauqī al-fanjârī *damān al-Ijtimā'* adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, sekurangnya tercukupi keperluan asas dalam hidup

---

<sup>11</sup>Hudiyanto, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Linkar Media, 2014), hlm.12.

<sup>12</sup> Oktavia Tirani, *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso*, Jurnal Katalogis Vol. 5, No.6 (Juni 2017), hlm.1-9.

mereka melalui bantuan dana yang mencukupi.<sup>13</sup> Maka pemerintah membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, seperti PKH atau Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2020 di Indonesia mengalami Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor lainnya termasuk sosial ekonomi. Menyikapi dampak tersebut, sejak Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung daya beli dan kegiatan usaha masyarakat, yang menyebabkan masyarakat miskin kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang. Kelompok yang paling terkena dampak adalah mereka yang bekerja di perkotaan dan sektor informal. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pembatasan pengoperasian fasilitas umum.

Masyarakat miskin terutama menanggapi dampak pandemi dengan mengurangi pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan. Pengurangan pengeluaran terutama dicapai dengan mengurangi/mengubah pola konsumsi dan menghilangkan uang saku anak. Misalnya, menambah penghasilan dengan berganti pekerjaan, melakukan pekerjaan sampingan, dan berpindah-pindah. Sejumlah kecil keluarga miskin juga melakukan upaya lain, seperti meminjam dan menggunakan tabungan. Keluarga miskin penerima PKH juga memanfaatkan bantuan yang diterimanya sebagai jaring pengaman untuk mengurangi dampak pandemi. Program tersebut membantu KPM meminimalkan dampak pandemi melalui pendapatan tunai, pengurangan pengeluaran, dan penyediaan makanan keluarga.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menjadi solusi dari masalah dan upaya pengentasan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga, Di bandingkan dengan program prakerja, Program Keluarga Harapan

---

<sup>13</sup> Aidil Alfin, *Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takāful Al-Ijtimā'ī, Damān Al-Ijtimā'ī Dan Ta'min Al-Ijtimā'ī)*, Jurnal Al-Hurriyah Vol. 12, No.2 (Juli 2016), hlm.16.

(PKH) lebih bisa mengentaskan kemiskinan. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>14</sup> Dari definisi itu dapat diketahui bahwa prakerja tidak hanya diperuntukan untuk orang miskin saja. Bantuan prakerja dapat diakses baik yang masih membutuhkan maupun orang yang sudah sejahtera, bahkan yang dapat mengakses bantuan prakerja adalah orang yang sudah melek teknologi. Kalau dilihat prakerja memang kurang cocok untuk mengentaskan kemiskinan oleh sebab itu PKH adalah jawaban ketepatan penanggulangan kemiskinan dengan langsung ke akar rumput.

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan sosial, dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, menekan pengeluaran dan menurangi beban untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.<sup>15</sup> Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKD PFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.<sup>16</sup> Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.<sup>17</sup>

Program Keluarga Harapan sudah berskala nasional sejak 2007, namun baru diberlakukan di Kabupaten Banyumas sejak 2013. Hal ini

---

<sup>14</sup> <https://www.prakerja.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021

<sup>15</sup> Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

<sup>16</sup> Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin* Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

terjadi karena kebijakan dan sistem pemerintah belum siap saat itu. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah di tahun 2013, sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas mulai menjadi penerima manfaat PKH. Selama kurun waktu itu juga yaitu 2013 sampai 2019 dapat diketahui angka kemiskinan menurun dengan adanya kartu PKH ini, di tahun 2013 dari 296,8 juta jiwa menjadi 211,6 juta jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Banyumas memiliki kondisi kesejahteraan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1. **Tabel Kondisi Masyarakat Banyumas**

Kemiskinan	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	296.8	283.5	285.9	283.9	283.25	226.2	211.6
Persentase Penduduk Miskin (persen)	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05	13.5	12.53
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	295,742	309,106	320,585	344,514	357,748	366,442	385,140

Dari Tabel di atas dapat diketahui terjadi penurunan kemiskinan yang lumayan signifikan di Banyumas. Hal ini menjadi salah satu sumbangsih manfaat dari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 27 kecamatan yang ada di Banyumas, penerima manfaat PKH terdapat sekitar 104.606 keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “*Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas*”.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Implementasi prgram Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Banyumas jawa tengah.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.<sup>18</sup>

Tesis ini akan membatasi masalah kajiannya pada implementasi kebijakan PKH dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Banyumas yang diturunkan pembahasannya menjadi tiga poin yaitu konsep Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan, Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas di kabupaten Banyumas dan pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan meliputi : (1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan (2) Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan (3) Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas di kabupaten Banyumas dan pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH..

## **C. Batasan Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **a) Batasan Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam penulisan thesis ini tidak meluas dan tepat sasaran pada pokok pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan hanya berfokus pada Peraturan Menteri Sosial Republik

---

<sup>18</sup> TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta, Kementrian Sosial RI, 2017, hlm 1

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pedoman umum PKH dan analisis hanya dilakukan pada kabupaten Banyumas.

#### **b) Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, Secara khusus, penelitian ini menyelidiki yaitu konsep Kebijakan Pemda Banyumas dalam mengentaskan kemiskinan, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ,dampak Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat di rasakan para KPM di kabupaten Banyumas, pandangan secara Islam dan konvensional tentang kebijakan PKH, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan, dan Solusi kendala dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.



3. Untuk mengetahui Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
- c) Sebagai upaya penerapan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Ekonomi Syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain meningkatkan peran pemerintah dalam membantu pengentasan kemiskinan di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

- b) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, bahwa PKH dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya.

- c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan informasi di bidang ekonomi, serta diharapkan menjadi literatur ilmiah dan bahan bacaan lainnya bagi yang membutuhkan.

## F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman guna menghindari timbulnya salah penafsiran mengenai judul tesis yang penulis lakukan, terlebih dahulu penulis mendefinisikan beberapa istilah penting yang ada dalam judul tesis ini. Istilah-istilah yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

### a) Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.<sup>19</sup> Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>20</sup>

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.<sup>21</sup> Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.<sup>22</sup>

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan

---

<sup>19</sup>Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm.112.

<sup>20</sup>Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005), hlm.112.

<sup>21</sup> Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.185.

<sup>22</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm.98-99.

di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm.12.

Dengan demikian dapat difahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi (3) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, dan (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

#### b) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Istilah *falah* berasal dari bahasa arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>24</sup> *Falah*, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*).<sup>25</sup> Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.<sup>26</sup> Kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.62.

<sup>26</sup>Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam....., hlm.6.

#### 1) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (*Allah*), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

#### 2) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

#### 3) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak criminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

#### 4) Jaminan Sosial

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaiitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>27</sup> Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup

---

<sup>27</sup>Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.2.

manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan baik dalam material maupun non material, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), dan (5) intelek atau akal (*aql*).<sup>28</sup> Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.<sup>29</sup> Kesejahteraan dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### 5) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah tuhan (*Allah*), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

#### 6) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dar Allah SWT.

---

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hlm.62.

<sup>29</sup>Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam...,hlm.6.

#### 7) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

#### c) Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan *Millenium*. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka

kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.<sup>30</sup>

d) Tempat Penelitian

Banyumas adalah kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Brebes di utara, kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Kebumen di Timur, serta Kabupaten Cilacap di Selatan dan Barat. Dengan luas wilayah 1.329,02 Km<sup>2</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Susunan sistematis penulisan terbagi menjadi lima bab, tiap bab membahas masalahnya sendiri-sendiri, namun tetap ada keterkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya.

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai (a) latar belakang masalah, (b) Batasan dan rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) sistematika pemahasan.

Bab II membahas lebih terperinci mengenai apa pengertian implementasi, Program Keluarga Harapan dan pengentasan kemiskinan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari : (a) Rancangan Penelitian, (b) Kehadiran Peneliti, (c) Lokasi Penelitian, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Temuan, (h) Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari : (a) Deskripsi Data, (b) Temuan Penelitian. Pembahasan, terdiri dari: (a) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, (b) kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, (c) Untuk mengetahui Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyumas dan Pandangan Secara Islam Dan Konvensional Tentang Kebijakan PKH

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>30</sup>TNP2K, Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan Meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta, Kementerian Sosial RI, 2017, hlm 1.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Program PKH dalam Pengentasan Kemiskinan di Banyumas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pokok rumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Implementasi PKH di kabupaten Banyumas dari Pendataan Calon KPM PKH sampai mendapat Bantuan PKH dan perjalanan menjadi KPM dan sampai Graduasi yaitu calon KPM divalidasi kemudian mendapatkan persetujuan untuk burekol atau pembukaan rekening kemudian Dapat bantuan dananya cair setiap bulan p2k2 diverifikasi komitmen datanya di mutahirkan, memberikan edukasi agar KPM itu siap digraduasi kalo sudah mampu lulus menjadi KPM PKH di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pedum PKH tahun 2020 dan Sumber daya Pendamping PKH yang Cakap merupakan sarana untuk mendukung keberhasilan program PKH, dengan kecakapan Pendamping PKH dengan berbagainya dapat terselesaikan dan dapatberjalan maksimal, seperti Pendamping PKH dapat berperan sebagai Fasilitator, Motivator, Eksekutor data, bahkan partner bagi KPM
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan dampak positif pada kondisi masyarakat sekarang yaitu mewujudkan kemajuan dalam masyarakat terutama kemajuan kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat, Dampak lain yang ditimbulkan dari program tersebut diantaranya adalah dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banyumas. Setiap tahun hampir disetiap kecamatan terdapat graduasi mandiri, dari 3 tahun terakhir terdapat 3971 KPM yang graduasi mandiri dan graduasi mandiri dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan program KPM, adanya keberhasilan Program PKH dalam kontribusi Pengentasan Kemiskinan

di Kabupaten Banyumas. Dan Tujuan PKH sama seperti arti sebuah Kesejahteraan yaitu, dengan bantuan sosial yang diberikan orang yang tidak mampu menjadi terbebas dari jeratan kemiskinan, dan dengan adanya P2K2 diharapkan terbebas dari kebodohan, dan menuju Manusia yang melek akan pengetahuan, sehingga terhindar dari rasa takut sehingga orang-orang dapat memperoleh Kehidupan yang nyaman aman Tenram secara lahir maupun batin sesuai dengan kesejahteraan dalam islam.

- 3) Selama periode 2017-2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Banyumas menunjukkan tren penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Garis kemiskinan pendapatan perkapita perbulan di Banyumas adalah Rp. 366.442 kemudian akan meningkat menjadi Rp 406.250 pada tahun 2020 di karenakan gaya hidup baru dan meningkatnya kebutuhan seperti kuota internet karena mengikuti kebijakan Belajar dari Rumah bagi pelajar dan WFH pekerja. Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya dapat menggandeng Lembaga- Lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk sama sama mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

## **B. Saran**

- 1) Perlu adanya rencana strategis dalam penanganan kemiskinan bukan dalam pandangan normal tetapi penanganan kemiskinan dalam kejadian luar biasa seperti Pandemi Virus dan keadaan darurat seperti perang atau konflik untuk lebih mengantisipasi dan mempersiapkan hal yang dapat membuat orang mati karena kemiskinan, orang jatuh miskin karena daruratnya situasi.
- 2) Dengan dasar Penyelenggaraan otonomi daerah pada Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 pemkab Banyumas dapat Membuat

program pengentasan kemiskinan sendiri dengan Potensi wilayah masing masing serta membantu program pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan.

- 3) Mengoptimalkan P2K2 dalam mengembangkan dana bantuan, sehingga Bantuan PKH atau program penanggulangan kemiskinan lainnya tidak menjadi candu yang membuat KPM ketergantungan dengan Bantuan Sosial.
- 4) Mengingat graduasi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan Program PKH, tetapi pemerintah jangan terlalu memberikan sebuah target yang tinggi kepada pendamping PKH dalam menggraduasi karena ketika Pendamping PKH ketika di berikan tuntutan tinggi untuk graduasi mandiri di takutkan, kualitas dari graduasi mandiri itu sendiri tidak ada membuka jaringan pada pihak pemerintah dan swasta.
- 5) Kurangnya Dukungan yang ditunjukkan oleh Pemkab Banyumas seperti tidak adanya honor daerah atau dengan pengadaan Kendaraan yang dapat digunakan oleh para pendamping PKH untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan sulit. Dukungan Tidak cukup dukungan Moril saja tetapi dukungan bagaimana caranya untuk pelaksanaan kebijakan akan lebih mempermudah pelaksanaan Program PKH.
- 6) Dalam Kemiskinan Pemerintah dapat menggandeng Lembaga- Lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk sama sama mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintah dan badan amil zakat dapat berkolaborasi memaksimalkan potensi zakat yang belum di maksimalkan.

### C. Rekomendasi

Setelah penulis menyusun laporan penelitian tentang Program Keluarga Harapan dalam pengentasan Kemiskinan ini, penulis merekomendasikan kepada para peneliti dan akademisi. Banyak aspek dalam penelitian ini yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan riset lebih jauh. Seperti meneliti evaluasi Kebijakan PKH. Ini akan menarik dengan melihat efektivitas dari Program Keluarga Harapan dalam pengentasan Kemiskinan dan penelitian tersebut akan memungkinkan kita dalam menyusun konsep kemitraan program pesantrenisasi yang lebih generic.

Demikian hasil dari penelitian yang dapat penulis susun. Penulis berharap kritik dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

*Billahitaufiq wal hidayah*

Kawunganten. 12 Juni 2021



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Keempat*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Ahmad Tanzen, 2011. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras)
- Aidil Alfin. 2011, Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takāful Al-Ijti Mā'î, Damān Al-Ijti Mā'î Dan Ta'min Al-Ijti Mā'î). Jurnal Stain Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi,
- Amri Marzali, 2012 . *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Aprilia Saraswati, 2018. *Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi,
- Burhan Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Cholid Narkubo, 2003. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Chriswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 08/No.03/September/2005)
- Cik Hasan Bisri, 2003. *Model Penelitian Fiqih*, Cet 1, Bogor: Kencana,
- Conny semiawan, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: gramedia)
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Kementerian Sosial RI, 2021. *Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan ED. Revisi*,
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Kementerian Sosial RI, *Buku Kerja Pendampingan Program Keluarga Harapan (ED. Revisi, 2012)*
- Dokumen BPS Kabupaten Banyumas, 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020*. Banyumas
- Dokumen *Data Final Closing*, UPPKH Dinas Sosial Kab Banyumas Februari 2021
- Dokumen Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 Hlm 14-16

- Dokumen Peraturan Bupati Banyumas No 67 Tahun 2018 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas*
- Dokumen Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Bab II*
- Dokumen *Rencana Strategis Kementerian Sosial. 2020-2025 BAB 3*
- Eky Riswiana, 2020. Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Keluarga Miskin Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Wonopringgo). Tesis .
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.185.
- Faisal Basri, 2005. *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga)
- Guru PPKN. 2021. Tujuan Kebijakan Publik. Dalam <https://www.google.com/gmp/s/gurupkn.com/tujuan-kebijakan-publik/amp> diakses tanggal 17 Februari 2021
- <https://www.prakerja.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021
- Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Linkar Media
- Husen Umar.2005. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Istiana Hermawati, Dkk, 2015. *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Judith Belib, 2006. *Melakukan Proyek Penelitian Secara Mandiri*, Cet. IV (Jakarta: PT Indeks)
- K. Denzin dan Yunonns S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Terj) Darianto, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Ed. Revisi, 2013)
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum PKH Tahun 2020*, (Jakarta)
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta),
- Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta)
- Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta)
- Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020*, (Jakarta), hlm.4.

- Lexi J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)
- Lincoln Arsyad. 2015. *Ekonomi Pembnagunan, Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKPN, 2002)
- Muhammad Iqbal, 2017. *Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Islam*
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press,
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Rulan Ahmadi, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012)
- Saparinah Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang)
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta)
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta)
- Suharto Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial)*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Sukandarrumidi, 2004. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Sutrisno Hadi, 2002. *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Syufa'at . Fikih, 2015. *Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ibn Hazm (994-1064 M)*. Jurnal IAIN Purwokerto
- TNP2K, 2017. Panduan Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Kementerian Sosial RI,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1*
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Viqra Ramadanti, *Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)*, (Thesis tidak diterbitkan Universitas Negeri Makassar)
- Walter. A Friedlander, 1961.*Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Wawancara Kepala Bidang Kejahteraan Sosial. Penanganan fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas. Lili Mudjiyanto. tanggal 22 Februari 2021 jam 09:30
- Wawancara Kordinator Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Warno. tanggal 15 Februari 2021 jam 10:00.
- Wawancara KPM PKH Graduasi Kabupaten Banyumas. Irma tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00.
- Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. Ida tanggal 22 Februari 2021 jam 11:00.
- Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. sumiyati KPM PKH lainnya, wawancara Pada 23 Februari 2021. jam 10:00
- Wawancara KPM PKH Kabupaten Banyumas. Waryanti tanggal 22 Februari 2021, jam 09:00.
- Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Dendi. Pendamping Sosial Kabupaten Banyumas 25 Februari 17 : 23
- Wawancara Pendamping PKH Kabupaten Banyumas. Raras. tanggal 22 Februari 2021 jam 10:00.
- Wisnu Indrajid V. O. 2014. Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. Malang: Intrans Publishing
- Yulianto Kadji, *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*. Jurnal. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ung
- Zainal Arifin, 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)